KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DJAKA BUDHI UTAMA**
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**
selaku atasan pihak pertama,

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua:

Pihak pertama pada tahun 2023, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**DJAKA BUDHI UTAMA**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
1	**2**	**3**
Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	94%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%
Meningkatnya Birokrasi yang efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	BB
	2. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);	33,93
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	87

Jumlah Anggaran:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Jakarta, Rp. 21.586.133.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

DJAKA BUDHI UTAMA

MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI I/POLDAGRI TAHUN 2022

Sasaran Strategis I	**Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif**
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian Indeks Demokrasi Indonesia
Definisi	Pasal 3 Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam menyebutkan bahwa salah satu tugas Kemenko Polhukam adalah melaksanakan pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang Kabinet. Salah satu Program Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang RKP 2023 adalah Mewujudkan Stabilitas Polhukhankam, dengan salah satunya diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI sendiri merupakan program bersama yang dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas, dan BPS untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, Kemenko Polhukam bertindak sebagai Leading Sector. Pada IDI Metode Baru yang mulai diterapkan pada TA 2022, tingkat capaiannya diukur berdasarkan kinerja 3 Aspek dan 22 Indikator. Aspek-aspek tersebut yakni Kebebasan (terdiri dari 7 indikator), Kesetaraan (terdiri dari 7 indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (terdiri dari 8 indikator). Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapatkan oleh suatu metode akan memvalidasi (cross validate) data yang didapatkan dengan metode lainnya. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Data tersebut divalidasi dalam FGD yang

	melibatkan pakar/ahli yang relevan. Dalam FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia. FGD akan dipimpin oleh fasilitator yang merupakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi. Peserta FGD merupakan perwakilan pemerintah, aparat keamanan, universitas, pers, tokoh masyarakat, serta LSM. Hasil pengukuran IDI disampaikan dalam bentuk angka dengan rentang 0 s.d 100. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut : 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik. Adapun target IDI 2022 yang diukur pada TA 2023 sebesar 78,37.
Sumber Data	Rilis Hasil IDI Badan Pusat Statistik (BPS)
Cara Menghitung	$\frac{Realisasi\ Capaian\ IDI}{Target\ IDI}\ X\ 100\%$
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target Indeks Demokrasi Indonesia.
Definisi	Mengukur sejauhmana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik, dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional.
Cara Menghitung	$\frac{Realisasi\ Rekomendasi}{Target\ Rekomendasi}\ X\ 100\%$ Target Rekomendasi kebijakan sebagai berikut : Asdep 1 : Penguatan Demokrasi di Daerah. Asdep 2 : Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah.

	Asdep 3 : Jumlah Pengurus Parpol yang Mendapat Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila. Asdep 4 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-daerah.
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\frac{\text{Butir} - \text{Butir Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Butir} - \text{Butir Rekomendasi yang dihasilkan}} X\ 100\%$
Sasaran Strategis 2	**Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal**
Indikator Kinerja 1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja;

	4. Evaluasi Internal; 5. Capaian Kinerja.
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%). Kategori Penilaian: 1. AA (>90-100); 2. A (>80-90); 3. BB (>70-80); 4. B (>60-70); 5. CC (>50-60); 6. C (>30-50); 7. D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Nilai Pelaksanaan Mandiri Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu: 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan Tatalaksana; 5. Penguatan Pengawasan; 6. Penatan Sistem Manajemen SDM; 7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja; dan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

	penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada delapan area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
Definisi	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.
Sumber Data	Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel: 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2. Keselarasan TOR & RAB; 3. Jumlah revisi; 4. Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional; 5. Respons Perencana unit organisasi; 6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev; 7. Kualitas Laporan Kinerja; 8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan; 9. Respons Pengelola Monev unit organisasi.
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: *50 poin untuk unsur perencanaan; *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.
Indikator Kinerja 4	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat
Definisi	Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasaan *stakeholders* di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terhadap pelayanan Kesekretariatan
Sumber Data	Hasil survey kepuasan layanan sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dari *stakeholders*.

Cara Menghitung	Penilaian berdasarkan hasil survey bagian administrasi dengan menggunakan kategorisasi skala likert: 1) 1,00-1,79 = Sangat tidak puas 2) 1,80-2,59 = Tidak puas 3) 2,60-3,39 = Cukup puas 4) 3,40-4,19 = Puas 5) 4,20-5,00 = Sangat puas Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut: Σ = Hasil Survei Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Jakarta, Januari 2023

Deputi Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri,

DJAKA BUDHI UTAMA